



PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TIMUR



PMP RB

Evaluasi Unit Kerja



Tim Reformasi Birokrasi

- Penanggung jawab RB unit kerja telah ditetapkan

Dokumen Rencana Pembangunan RB

- Rencana Kerja RB disusun dan diformalkan
- Rencana Kerja RB unit selaras dengan Road Map
- Sosialisasi/ Internalisasi

Pemantauan dan Evaluasi RB

- Terdapat monitoring dan evaluasi
- Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti

Perubahan pola pikir dan budaya kinerja

- Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan RB
- Sudah ditetapkan agen perubahan

II PENATAAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

INSTANSI

UNIT KERJA

Penilaian		Penjelasan		Bobot	Nilai	%	Bobot	Nilai	%	TOTAL	Bobot
II.	PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5)			5,00	3,75	75%		1,25	25%	5,00	5,00
	1	Harmonisasi (2,5)		1,25	1,25	100%	1,25	1,25	100%		2,50
		c. Unit Kerja telah melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan/kebijakan yang akan direvisi/dihapus	a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan/kebijakan yang akan diriviu/dihapus b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian peraturan perundang-undangan/kebijakan yang akan dirivu/dihapus c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan/kebijakan yang akan direvisi/dihapus					1			
		d. Unit kerja telah melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai hasil pemetaan	a. Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundangan-undangan yang tidak harmonis b. Upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah dilakukan, namun belum selesai c. Belum dilakukan upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron					1			
	2	Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (2,5)		2,50	2,50	100%					2,50



PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

INSTANSI

UNIT KERJA

Penilaian		Penjelasan			Bobot	Nilai	%	Bobot	Nilai	%	TOTAL	Bobot
III.	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (6)			6,00	4,50	75%		1,50	25%	6,00	6,00	
	1. Evaluasi (3)			1,50	1,50	100%	1,50	1,50	100%		3,00	
	j.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan seluruh fungsi unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan sebagian fungsi unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan unit kerja					1				
	k.	Hasil assesment telah direviu oleh unit/bagian organisasi	Ya/Tidak					1				
	2. Penataan (3)			3,00	3,00	100%					3,00	



Proses bisnis dan SOP Kegiatan Utama

- Peta Proses Bisnis
- SOP mengacu pada peta proses bisnis
- SOP telah diterapkan
- Proses Bisnis dan SOP telah dievaluasi

E-Government

- Pengembangan E-Gov untuk pengembangan pelayanan

Keterbukaan Informasi Publik

- Kebijakan tentang keterbukaan informasi public
- Monev Keterbukaan Informasi Publik

Kualitas pengelolaan Arsip

Perencanaan SDM sesuai dengan kebutuhan

- Kebutuhan pegawai disusun mengacu peta jabatan dan hasil ABK
- Penempatan Pegawai hasil rekrutmen mengacu pada kebutuhan
- Monev

Pola Mutasi Internal

- Mutasi pegawai antar jabatan
- Mutasi pegawai antar jabatan memperhatikan kompetensi
- Monev

Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

- TNA
- Pengembangan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja
- Pegawai mendapatkan kesempatan untuk diklat
- Upaya pengembangan kompetensi
- Monev

Penetapan Kinerja Individu

- Penetapan Kinerja Individu
- Ukuran Kinerja Individu sesu dg di atasnya
- Dilakukan secara periodic
- Hasil Kinerja sebagai dasar reward/ punishment

Penegakan aturan disiplin

- Aturan disiplin/ kode etik telah dilaksanakan

Sistem Informasi Kepegawain

- Pemutakhiran data

**Keterlibatan
pimpinan**

**Pengelolaan
Akuntabilitas
Kinerja**

**Keterlibatan
langsung pimpinan**

**Dokumen
perencanaan
sudah ada**

**Berorientasi
hasil**

IKU

**Pimpinan
memantau
pencapaian kinerja
secara berkala**

**Indikator
SMART**

**Laporan
disusun tepat
waktu**

- **Pengendalian Gratifikasi**
- **Penerapan SPIP**
- **Pengaduan Masyarakat**
- **Whistle-Blowing System**
- **Penanganan Benturan Kepentingan**
- **Pembangunan Zona Integritas**
- **Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**

Standar Pelayanan

Kebijakan SP

Dimaklumkan

SOP

Reviu dan perbaikan
atas SP dan SOPBudaya Pelayanan
PrimaSosialisasi Budaya
Pelayanan PrimaMudah diakses di
mediaPunishment/ reward
bagi pelaksanaKompensasi kepada
penerima layanan jika
tidak sesuai standar

Inovasi

Penilaian Kepuasan
terhadap Pelayanan

SKM

SKM dapat diakses
secara terbukaTindak lanjut atas
SKM

Pengelolaan Pengaduan

TL atas pengaduan Pelayanan

Evaluasi

Unit kerja pengelolapengaduan

SOP Pengaduan

Media Pengaduan Pelayanan

Pemanfaatan Teknologi Informasi

**Telah menerapkan TI
dalam memberikan pelayanan**

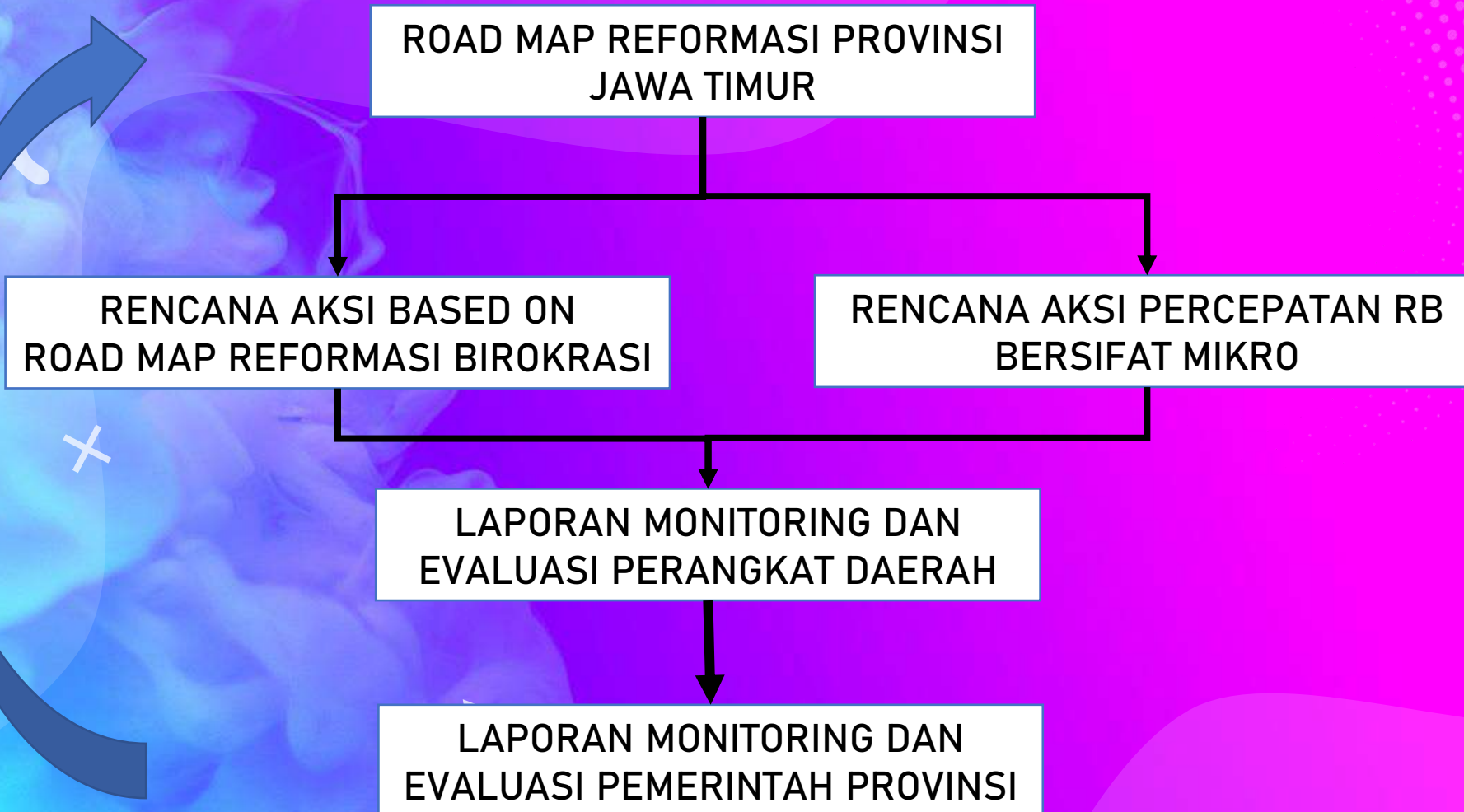
**Telah dilakukan perbaikan secara
terus menerus**



MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAAN REFORMASI BIROKRASI



PERANGKAT DAERAH PADA REFORMASI BIROKRASI





Contoh rencana aksi (1/2)

Area Perubahan	Output yang diharapkan	Rencana Pelaksanaan												Realisasi Output	Penanggung Jawab
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
A. Tujuan I															
1. Menguatnya Integritas dan Budaya Anti Korupsi dalam Birokrasi															
a. Indeks Integritas															
b. Survey Persepsi Anti Korupsi															

* Mengacu pada Road Map RB 2020 - 2024



Contoh rencana aksi (2/2)

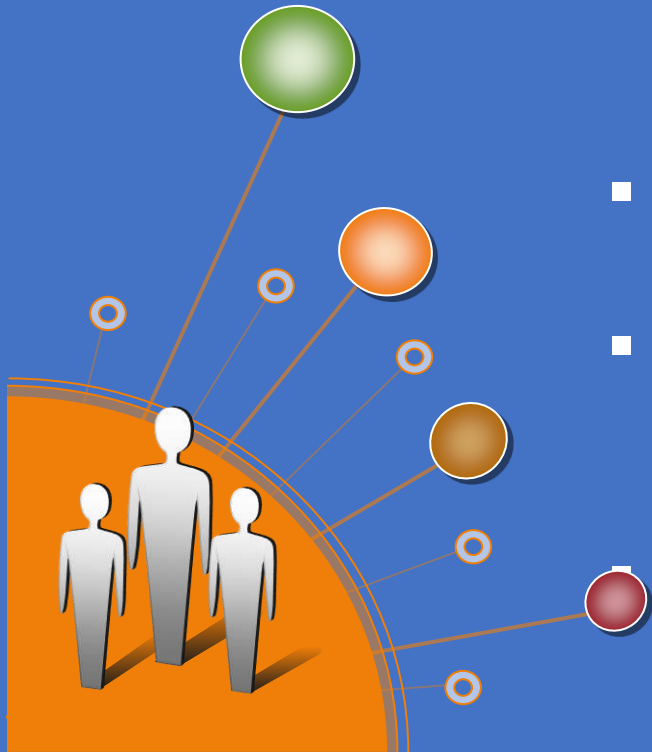
Area Perubahan	Output yang diharapkan	Rencana Pelaksanaan												Realisasi Output	Penanggung Jawab
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
A. Manajemen Perubahan															
1. Tim Kerja															
a. Pemilihan Anggota Tim Pembanguna n Zona Integritas															
b. Penyusunan SK Tim															

* Bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Unit Kerja



Penguatan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

- Selain menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian PAN dan RB sebagai instrument utama dalam monev, akan diatur mekanisme monev secara periodik
- Monev secara periodik tersebut akan dilakukan baik pada level Pemerintah Provinsi maupun OPD
- Laporan monev disusun selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah semester 1 / 2 berakhir berupa tabel kendali
- Pada setiap akhir tahun, menyusun laporan akhir Pelaksanaan RB Perangkat Daerah



GOALS

Dengan adanya tools/instrumen ini, diharapkan bisa menyempurnakan Percepatan Pelaksanaan RB :

1. Sebagai alat evaluasi untuk mendeteksi hambatan yang dijumpai oleh PD saat pelaksanaan RB
2. Menentukan Rencana Tindak Lanjut terkait hambatan yang ditemui, sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan sesuai yg diharapkan, dan nantinya dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi bisa lebih terarah dan komprehensif



SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
- C. SISTEMATIKA

BAB II RENCANA KERJA

- A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
- B. RENCANA KERJA (Jangka Menengah Dan Tahun Berjalan)

BAB III PELAKSANAAN RB

- A. REALISASI DAN CAPAIAN
- B. ANALISIS, EVALUASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

BAB IV PENUTUP

- A. SIMPULAN
- B. REKOMENDASI



Terima Kasih